



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



RPJMD KABUPATEN
PULANG PISAU
TAHUN 2013-2018

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Aspek geografi memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Pulang Pisau lima tahun kedepan.

2.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 8.997 km² atau sekitar 5.85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km²). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

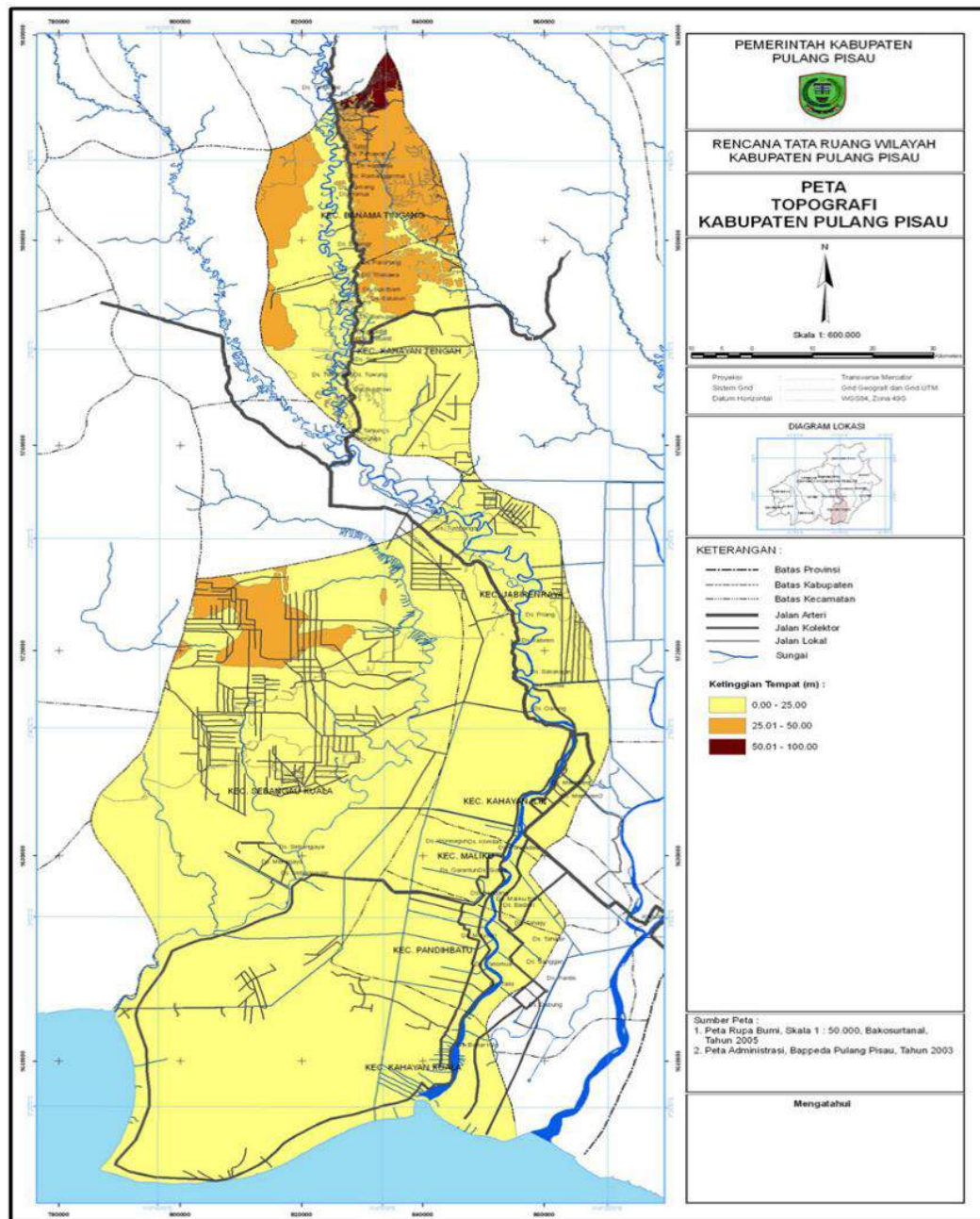
Secara administratif wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Gunung Mas.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya;
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau terletak di **Pulang Pisau**.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau



Sedangkan untuk luas wilayah masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Bagan 2.1.

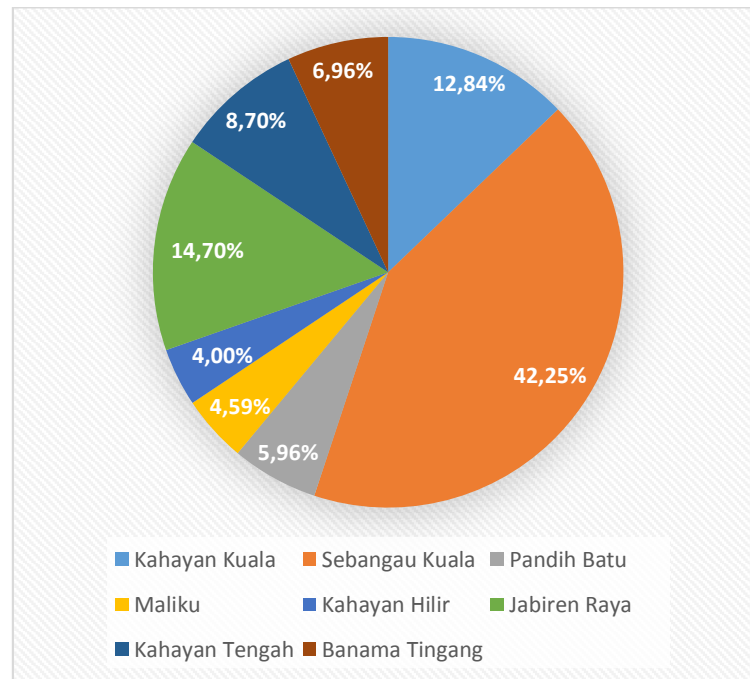
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ² .)	Persentase (%) terhadap Luas Pulang Pisau	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	1.155,00	12,84	13
2.	Sebangu Kuala	Sebangu Permai	3.801,00	42,25	8
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	535,86	5,96	16
4.	Maliku	Maliku Baru	413,14	4,59	15
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	360,00	4,00	10
6.	Jabiren Raya	Jabiren	1.323,00	14,70	8
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	783,00	8,70	14
8.	Banama Tingang	Bawan	626,00	6,96	15
Jumlah			8.997	100,00	99

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sebangu Kuala yaitu seluas 3.801 km² atau 42,25% dari total luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kahayan Hilir dengan persentase luas 4% dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Ditunjukkan oleh Bagan 2.1 berikut.

Bagan 2.1 Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.1.2. Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- 1) Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8° - 15° , serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ}$ - 25°
- 2) Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0° - 8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut

(dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.2 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangu Kuala	Sebangu Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta **geologi** formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsol dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai.

2.1.4. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km;
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 180 km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,6$ km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang $\pm 6,5$ km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 7 km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 6 km;
- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang $\pm 153,4$ km dari timur ke barat.

Tabel 2.3 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara $26,5^{\circ}\text{C}$ – $27,5^{\circ}\text{C}$

dengan suhu rata-rata maksimum 32,5°C dan minimum 22,9°C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

2.1.6. *Potensi Pengembangan Wilayah*

2.1.6.1 *Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan*

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, penggunaan lahan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 untuk Kawasan Hutan adalah seluas 5.095 km², dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kawasan Hutan lindung dengan Luas : 1.961 km²
- 2) Kawasan Hutan gambut dengan Luas : 2.789 km²
- 3) Kawasan mangrove (bakau) dengan Luas: 280 km²
- 4) Kawasan air hitam dengan Luas : 65 km²

2.1.6.2 *Pola Penggunaan Lahan Areal Budidaya (Non Hutan)*

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, penggunaan lahan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 untuk Kawasan Budidaya adalah seluas 3.902 km², dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hutan produksi : 369 km²
- 2) Hutan produksi tetap : 753 km²
- 3) Pertanian ladang basah (sawah) : 404 km²

4) Perkebunan dan peternakan	: 1.384 km ²
5) Pemukiman perkotaan	: 46 km ²
6) Pemukiman transmigrasi	: 99 km ²
7) Perairan dan sungai	: 492 km ²
8) Jaringan jalan	: 16 km ²

2.1.7. Demografi

2.1.7.1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Pada tahun 2012 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 122.511 jiwa, yang terdiri atas 63.699 laki-laki dan 58.812 perempuan. Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maluku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 26.813 jiwa dan 23.374 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8.997 kilometer persegi yang didiami oleh 122.511 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 74 penduduk per km², diikuti Kecamatan Maluku sebanyak 57 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah Kecamatan adalah Sebangau Kuala, hanya 2 penduduk per km². (Lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.155	20.175	17
2	Sebangau Kuala	3.801	8.024	2
3	Pandih Batu	535,86	20.155	38
4	Maliku	413,14	23.374	57
5	Kahayan Hilir	360,00	26.813	74
6	Jabiren Raya	1.323,00	7.912	6
7	Kahayan Tengah	783,00	7.515	10
8	Banama Tingang	626,00	8.543	14
Jumlah Total		8.997	122.511	14
Tahun 2011			122.073	
Tahun 2010			119.983	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.1.7.2 Sex Ratio

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari laki-laki 63.699 jiwa dan perempuan 58.812 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108. Dengan demikian, terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 14 jiwa per km². (Lihat Tabel 2.5)

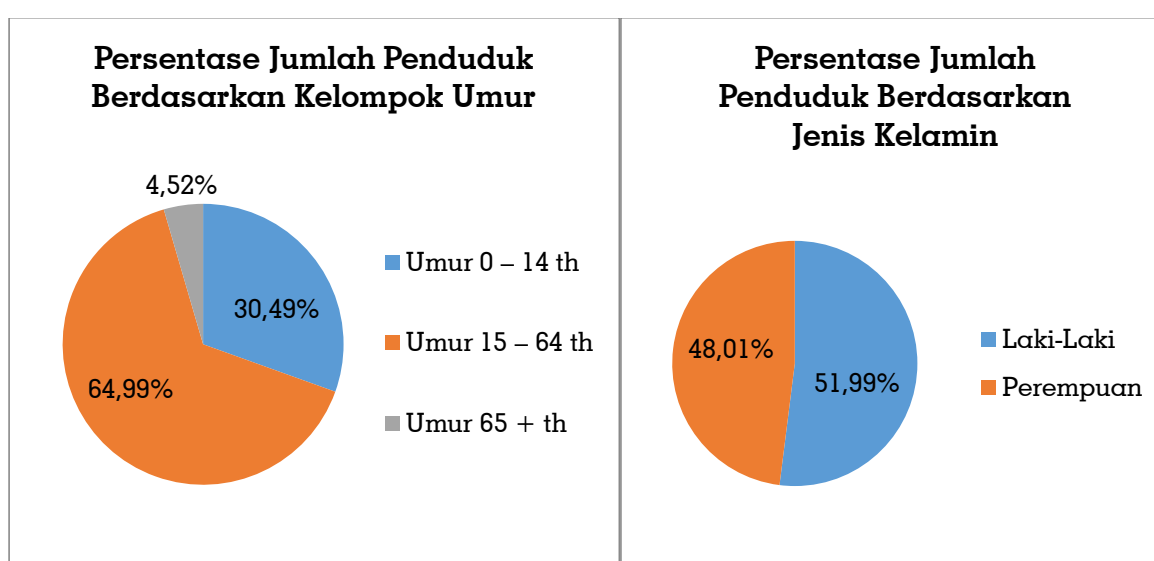
Dilihat dari kelompok umur selama tahun 2012, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 64,99%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 30,49% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4,52%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Bagan 2.2.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jmlh	Kepadatan Penduduk
		0 – 14	15 – 64	65 +	Laki-Laki	Perempuan	Rasio		(Jiwa/km ²)
2012	Jiwa	37.350	79.624	5.537	63.699	58.812	108	122.511	14
	%	30,49	64,99	4,52	51,99	48,01		100,00	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Bagan 2.2 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

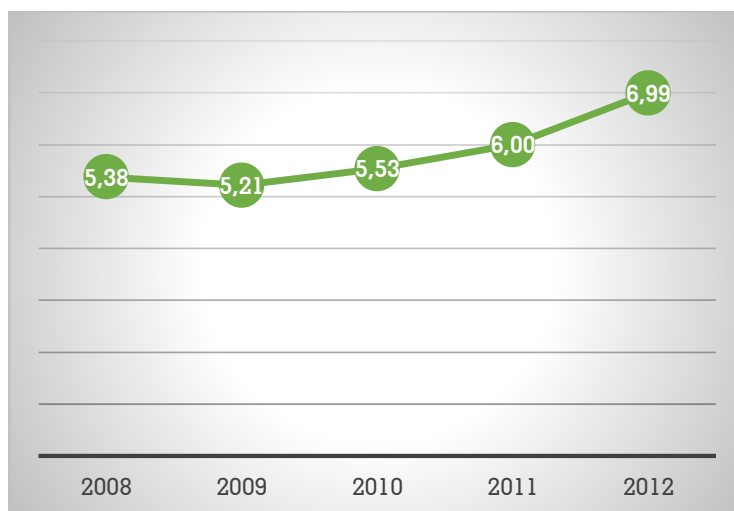
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2012 tumbuh realtif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

Bagan 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2012 sebesar 6,99%. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2012 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar Rp 975.201,84 juta dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2000) sebesar Rp 454.450,22 juta. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2008-2012 berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 5,38% menjadi 6,99%. Akan tetapi pada tahun 2008-2009, laju pertumbuhan ekonomi turun dari 5,38% menjadi 5,21% (dampak krisis global).

Walaupun berfluktuasi, pertumbuhan ekonomi masih positif. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2012 tingkat perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau terus meningkat setiap tahun.

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu **PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku** dan **PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan**.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2008 dan 2012 dilihat dari laju pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Pertanian	578.014,89	650.073,06	743.337,42	841.621,96	975.201,84
2	Pertambangan & penggalian	2.736,77	3.082,16	3.453,97	3.918,33	4.360,33
3	Industri pengolahan	58.278,01	63.535,60	70.401,20	76.856,22	82.609,98
4	Listrik, gas & air bersih	3.879,79	4.330,40	4.837,56	5.383,79	6.036,79
5	Konstruksi	76.743,02	83.811,59	91.083,85	105.240,51	125.586,33
6	Perdagangan, hotel & restoran	162.864,39	174.780,20	199.946,63	226.168,45	251.814,40
7	Pengangkutan & komunikasi	27.597,41	29.586,82	32.287,99	34.870,30	38.582,07
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	22.081,90	22.489,68	23.020,50	24.498,98	26.745,85
9	Jasa-jasa	98.582,85	110.218,34	125.872,38	146.743,51	166.902,11
PDRB		1.030.779,03	1.141.907,85	1.294.241,50	1.465.302,05	1.677.839,70

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2008-2012 pada masing-masing sektor (Tabel 2.6), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.7 Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Tahun				
	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
Pertanian	56,08	56,93	57,43	57,44	58,12
Pertambangan & penggalian	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26
Industri pengolahan	5,65	5,56	5,44	5,25	4,92
Listrik,gas & air bersih	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36
Konstruksi	7,45	7,34	7,04	7,18	7,49
Perdagangan, hotel & restoran	15,80	15,31	15,45	15,43	15,01
Pengangkutan & komunikasi	2,68	2,59	2,49	2,38	2,30
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2,14	1,97	1,78	1,67	1,59
Jasa-jasa	9,56	9,65	9,73	10,01	9,95
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012, diolah

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kabupaten Pulang Pisau selama kurun waktu tahun 2008-2012. Persentasenya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sektor perdagangan, hotel, & restoran walaupun jumlahnya cenderung fluktuatif.

**Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Pertanian	362.466,38	381.200,38	403.357,64	423.194,09	454.450,22
2	Pertambangan & penggalian	1.512,66	1.600,05	1.677,69	1.794,02	1.942,37
3	Industri pengolahan	40.560,52	42.756,73	44.320,95	46.519,27	48.781,44
4	Listrik,gas & air bersih	1.681,67	1.713,20	1.771,18	1.841,36	1.980,06
5	Konstruksi	57.521,92	61.409,65	65.098,95	71.411,66	78.478,41
6	Perdagangan, hotel & restoran	118.961,92	125.714,78	132.839,59	142.856,90	151.101,18
7	Pengangkutan & komunikasi	13.365,99	13.577,92	13.874,75	14.090,82	14.563,63
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	14.446,22	14.590,51	14.790,04	15.558,40	15.848,98
9	Jasa-jasa	55.880,83	58.584,65	62.223,73	67.073,43	72.044,01
	PDRB	666.398,11	701.147,87	739.954,52	784.339,95	839.190,30

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari

pengamatan terhadap PDRB ADHK selama kurun waktu 2008-2012 pada masing-masing sektor (Tabel 2.8), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK 2000 terbesar kedua pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHK 2000 pada tahun 2012 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.9 Persentase Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

Sektor	Tahun				
	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2013 (%)
Pertanian	54,39	54,37	54,51	53,96	54,15
Pertambangan & penggalian	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Industri pengolahan	6,09	6,10	5,99	5,93	5,81
Listrik, gas & air bersih	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24
Konstruksi	8,63	8,76	8,80	9,10	9,35
Perdagangan, hotel & restoran	17,85	17,93	17,95	18,21	18,01
Pengangkutan & komunikasi	2,01	1,94	1,88	1,80	1,74
Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2,17	2,08	2,00	1,98	1,89
Jasa-jasa	8,39	8,36	8,41	8,55	8,58
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012, diolah

Demikian halnya dengan PDRB ADHK 2000, sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar selama kurun waktu tahun 2008-2012, walaupun jumlahnya cenderung fluktuatif. Sementara sektor perdagangan, hotel, & restoran berada di urutan kedua dalam memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Pulang Pisau.

**Tabel 2.10 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pulang
Pisau**

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian	11,50	3,66	12,47	5,17	14,35	5,81	13,22	4,92	15,87	7,39
2	Pertambangan & penggalian	10,66	5,50	12,62	5,78	12,06	4,85	13,44	6,93	11,28	8,27
3	Industri pengolahan	10,84	6,93	9,02	5,41	10,81	3,66	9,17	4,96	7,49	4,86
4	Listrik, gas & air bersih	8,54	3,25	11,61	1,87	11,71	3,38	11,29	3,96	12,13	7,53
5	Konstruksi	9,87	9,07	9,21	6,76	8,68	6,01	15,54	9,70	19,33	9,90
6	Perdagangan, hotel, & restoran	11,07	8,08	7,32	5,68	14,40	5,67	13,11	7,54	11,34	5,77
7	Pengangkutan & komunikasi	6,81	1,58	7,21	1,59	9,13	2,19	8,00	1,56	10,64	3,36
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	7,65	1,04	1,85	1,00	2,36	1,37	6,42	5,20	9,17	1,87
9	Jasa-jasa	18,91	8,62	11,80	4,84	14,20	6,21	16,58	7,79	13,74	7,41
	PDRB	11,71	5,38	10,78	5,21	13,34	5,53	13,22	6,00	14,50	6,99

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

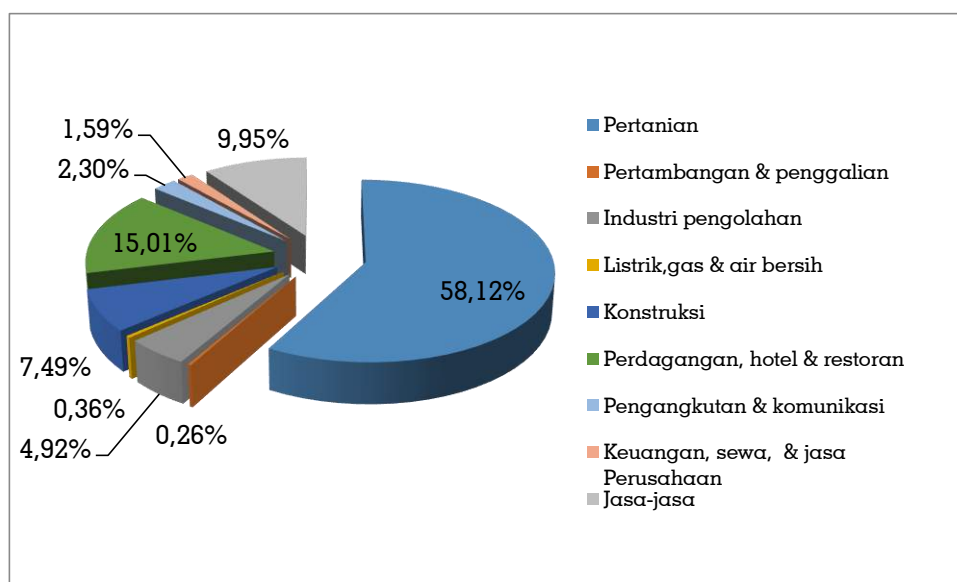
Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2012 terjadi pada sektor konstruksi sebesar 9,90%, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,27% dan sektor listrik, gas & air bersih sebesar 7,53%. Pertumbuhan sektor konstruksi menjadi terbesar pada tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2012 berlangsung kegiatan konstruksi berupa pelebaran dan penambahan Jembatan Tumbang Nusa, pembangunan pelabuhan Kahayan Kuala, dan kegiatan-kegiatan konstruksi lainnya.

2.2.1.3. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB.

Bagan 2.4 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2012



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012, yaitu sebesar 58,12%. Kemudian sektor perdagangan, hotel, & restoran sebesar 15,01%, sektor jasa-jasa sebesar 9,95%, dan sektor konstruksi sebesar 7,49%. Sektor industri pengolahan 4,92%, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 2,30%, sektor keuangan, sewa, & jasa perusahaan sebesar 1,59%, sektor listrik, gas, & air bersih sebesar 0,36% dan sektor yang paling sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 yaitu sektor pertambangan & penggalian sebesar 0,26%.

2.2.1.4. Perkembangan PDRB per Kelompok Sektor

Indeks *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu analisis untuk mengetahui sektor unggulan di suatu wilayah. LQ dapat digunakan untuk melihat sektor-sektor yang berpotensi di suatu daerah untuk dikembangkan, yang memungkinkan dapat menjadi tumpuan perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.11 *Location Quotient (LQ) PDRB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012*

Sektor	Analisa LQ
1 Pertanian	1,86
2 Pertambangan & Penggalian	0,02
3 Industri Pengolahan	0,81
4 Listrik, Gas & Air Bersih	0,51
5 Bangunan/konstruksi	1,61
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	0,95
7 Pengangkutan & Komunikasi	0,22
8 Keuangan, persewaan, & js. Prsh.	0,28
9 Jasa-Jasa	0,66
Total	1,00

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2012

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau yang mempunyai nilai *Location Quotient* (LQ) cukup besar yaitu sektor pertanian (1,86) dan sektor konstruksi (1,61). Hal ini berarti bahwa dua sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau untuk dapat dioptimalkan pengelolaannya.

2.2.1.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk,

sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.12 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 – 2011

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)
2007	7.373.445,02	5.053.184,75
2008	8.206.908,19	5.305.761,91
2009	9.538.154,47	5.856.564,31
2010	10.779.776,27	6.163.103,33
2011	12.003.489,99	6.425.171,54

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau 2012

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2007-2011 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2000, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp 7.373.445,02 (tahun 2007) menjadi Rp 12.003.489,99 (tahun 2011) dan untuk nilai atas dasar konstan 2000 dari Rp 5.053.184,75 (tahun 2007) menjadi Rp 6.425.171,54 (tahun 2011). PDRB per Kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

2.2.1.6. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau.

**Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
2009-2012**

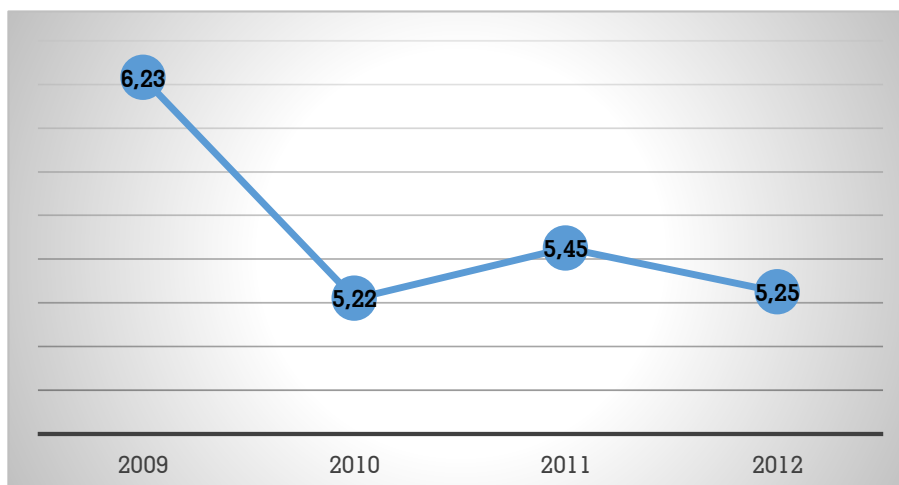
Tahun

Deskripsi	2009	2010	2011	2012
Jumlah Penduduk Miskin	8.669	7.419	6.690	6.340
Persentase Kemiskinan (%)	6,23	5,22	5,45	5,25

Sumber: *Profil Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau 2013*

Berdasarkan Bagan 2.5 dan Tabel 2.13 tingkat kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2012 berfluktuasi dan ada kecenderungan menurun, yaitu dari 6,23% tahun 2009 menjadi 5,25% tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan memberikan hasil yang positif, yaitu dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Bagan 2.5 Persentase (%) Penduduk dibawah Garis Kemiskinan



Sumber: *Profil Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 2,25, yang artinya bahwa dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 terdapat 5 orang yang berada di bawah garis kemiskinan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Jika diperhatikan pada Tabel 2.12, selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, IPM Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan, yakni dari 70,63 pada tahun 2008 meningkat menjadi 71,18 pada tahun 2009, 71,53 pada 2010, dan 72,37 pada tahun 2011. Meskipun memiliki trend meningkat, namun IPM Kabupaten Pulang Pisau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah yang paling rendah selama kurun waktu 2008-2011. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal.

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2011

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011
1	Kotawaringin Barat	72.86	73.30	73.79	74.19
2	Kotawaringin timur	73.36	73.97	74.34	74.74
3	Kapuas	72.89	73.22	73.60	74.00
4	Barito Selatan	72.96	73.29	73.60	74.01
5	Barito Utara	74.57	74.85	75.15	75.50
6	Sukamara	71.00	71.62	71.98	72.42
7	Lamandau	71.98	72.08	72.32	72.74
8	Seruyan	72.00	72.28	72.55	72.93
9	Katingan	72.06	72.33	72.65	73.32
10	Pulang Pisau	70.63	71.18	71.53	72.37
11	Gunung Mas	72.85	73.13	73.43	73.73
12	Barito Timur	72.17	72.72	73.00	73.33
13	Murung Raya	72.18	72.46	72.84	73.34
14	Kota Palangka Raya	77.90	78.02	78.30	78.78
15	KALTENG	73.88	74.36	74.64	75.06

Sumber: <http://kalteng.bps.go.id/ipm.html>

2.2.2.2. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis yang lebih dikenal dengan Angka Melek Huruf. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf.

Bagan 2.6 Angka Melek Huruf Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012



Sumber: Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

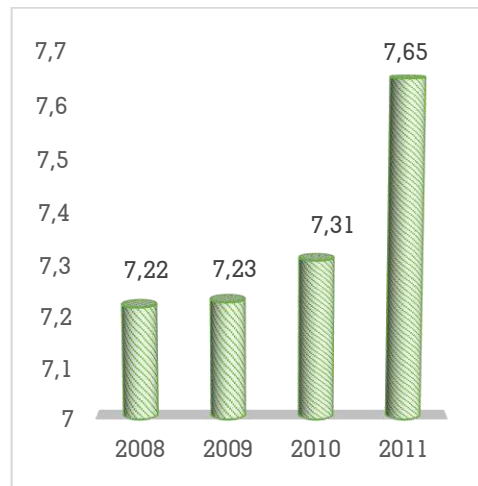
Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010-2012 cenderung meningkat dari 94,32% pada tahun 2010 menjadi 96,23% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2010-2012.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk

sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Bagan 2.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2011



Sumber: <http://kalteng.bps.go.id/ipm.html>

Berdasarkan Bagan 2.7, dapat diketahui bahwa angka rata-rata lama sekolah di Pulang Pisau selama kurun waktu 2008 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, yaitu dari 7,22 pada tahun 2008 menjadi 7,65 pada tahun 2011. Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2011 nilai rata-rata lama sekolah sebesar 7,65 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Pulang Pisau bersekolah sampai 7 tahun 7 bulan atau SMP. Meskipun angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun rata-rata lama sekolah penduduk yang 7 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa penduduk di Pulang Pisau belum memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum tentang banyak anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012**

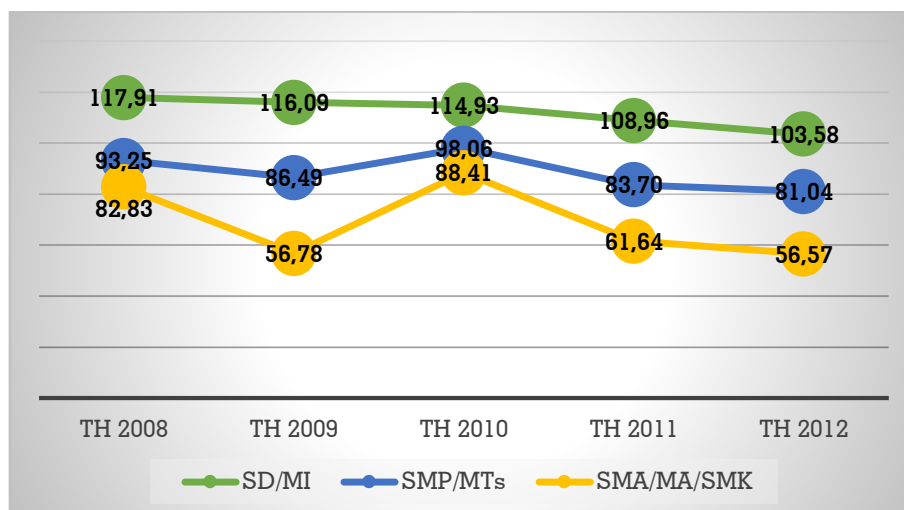
No	Jenjang Pendidikan	APK (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	117,91	116,09	114,93	108,96	103,6
2	SMP/MTs	93,25	86,49	98,06	83,70	81,04
3	SMA/MA/SMK	82,83	56,78	88,41	61,64	56,57

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Dari Tabel 2.15 dan Bagan 2.8 menunjukkan nilai APK Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2008 sampai 2012 memiliki trend menurun. Nilai APK untuk jenjang SMA merupakan yang paling rendah diantara jenjang yang lain. Nilai APK pada jenjang pendidikan SD memiliki nilai APK yang paling tinggi, namun juga menurun dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012 APK Kabupaten Pulang Pisau untuk tingkat SD sebesar 103,6%, artinya dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, ada 104 penduduk (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SD di Kabupaten Pulang Pisau. APK Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 untuk jenjang SMP sebesar 81,04%, artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SMP di Kabupaten Pulang Pisau. APK Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 untuk jenjang SMA sebesar 56,57%, artinya dari 100 penduduk usia 16-18 tahun (tanpa memandang usia) yang sedang/telah mengikuti pendidikan SMA di Kabupaten Pulang Pisau.

Bagan 2.8 APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Angka partisipasi murni adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Data mengenai angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 - 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 - 2012

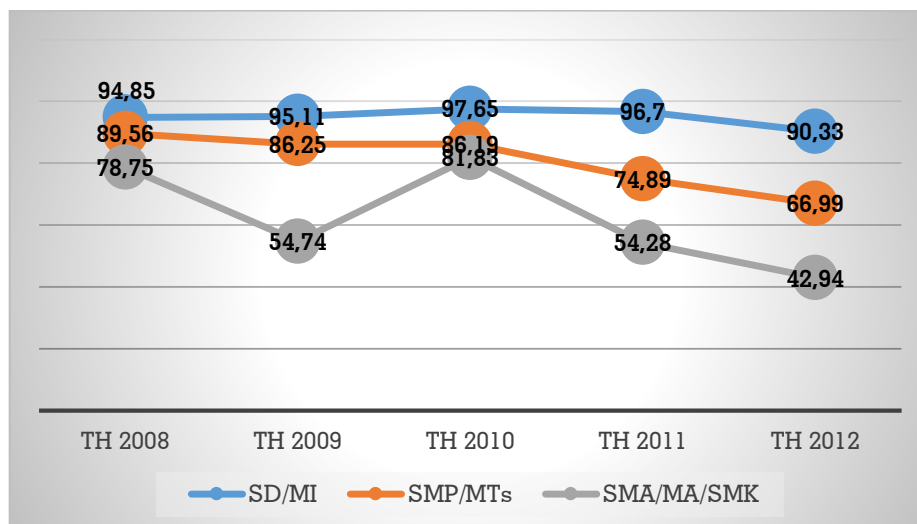
No	Jenjang Pendidikan	APM (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI	94,85	95,11	97,65	96,7	90,33
2	SMP/MTs	89,56	86,25	86,19	74,89	66,99
3	SMA/MA/SMK	78,75	54,74	81,83	54,28	42,94

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA masih merupakan yang paling rendah diantara jenjang yang lain. Untuk tingkat

SD, APM mengalami peningkatan periode 2008-2011, namun menurun pada tahun 2012. (Lihat Tabel 2.16 dan Bagan 2.9). Untuk tingkat SMP, APM selalu menurun setiap tahunnya, yaitu dari 89,56% (2008) menjadi hanya 66,99% (2012). Sedangkan untuk APM tingkat SMA mengalami penurunan dari 78,75% (2008) menjadi 54,74% (2009), kemudian meningkat menjadi 81,83% (2010), dan turun kembali secara signifikan menjadi 54,28% (2011) dan 42,94% (2012).

Bagan 2.9 **APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2008 - 2012**



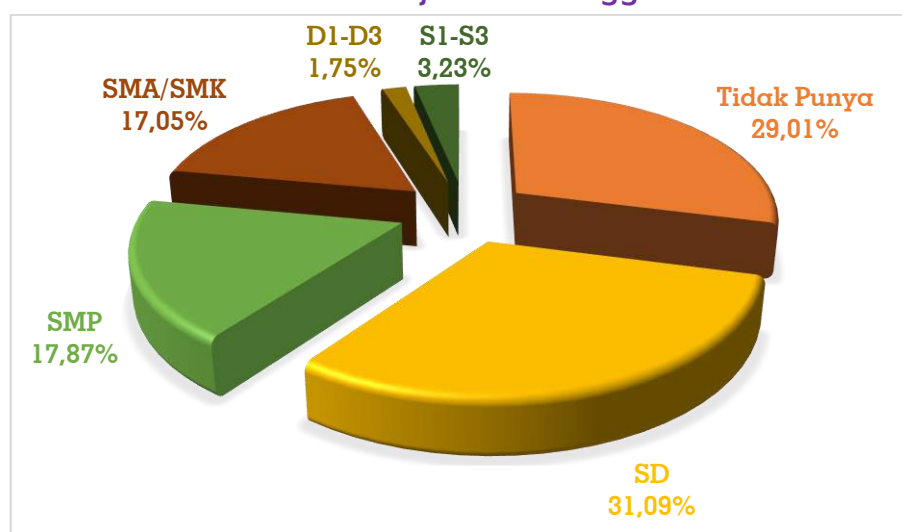
Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dan Profil Kesejahteraan Rakyat Pulang Pisau 2013

Kecenderungan penurunan APK dan APM di Kabupaten Pulang Pisau ini harus menjadi perhatian khusus. APK dan APM menggambarkan kondisi SDM suatu daerah di masa depan, dimana APK dan APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas penduduk juga tinggi. Sebaliknya, APK dan APM yang rendah menunjukkan tingkat intelektualitas penduduk juga kurang.

4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Manfaat menghitung APT adalah untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan disuatu daerah, selain itu berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama melihat kualifikasi menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Bagan 2.10 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2012



Sumber: *Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*

Pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang berumur 10 tahun keatas sebagian besar hanya memiliki ijazah SD yaitu sebanyak 31,09%. Sedangkan untuk penduduk yang menempuh pendidikan S1-S3 masih sangatlah minim, yaitu hanya berjumlah 3,23%.

2.2.2.3. Kesehatan

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.

Data mengenai Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau tidaklah lengkap. Namun data tersebut dapat disubstitusi dengan data yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau 2008-2013. Di dalam LKPJ AMJ disebutkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau sebesar 67,65 tahun yang

artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 67,65 tahun.

2. Presentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Data mengenai balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.17 Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

No	Status Gizi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	1	1	0	0	1

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008 dan 2009 jumlah balita gizi buruk hanya 1 (satu) balita, dan pada tahun 2010 dan 2011 berhasil diturunkan menjadi nol. Namun pada tahun 2011 meningkat kembali menjadi 1 (satu) balita. Hal ini berarti angka balita gizi buruk di Kabupaten Pulang Pisau sangatlah rendah.

Rendahnya balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan melihat data gizi buruk Kabupaten Pulang Pisau, maka hal itu adalah hal yang positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten Pulang Pisau. Penurunan nilai gizi buruk juga menggambarkan keberhasilan program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan gizi. Keberhasilan ini hendaknya dapat dipertahankan oleh aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kesehatan dengan melanjutkan program terkait pelayanan kesehatan balita dan mendorong inisiatif kegiatan penyehatan di tingkat masyarakat.

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Data pekerjaan penduduk menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

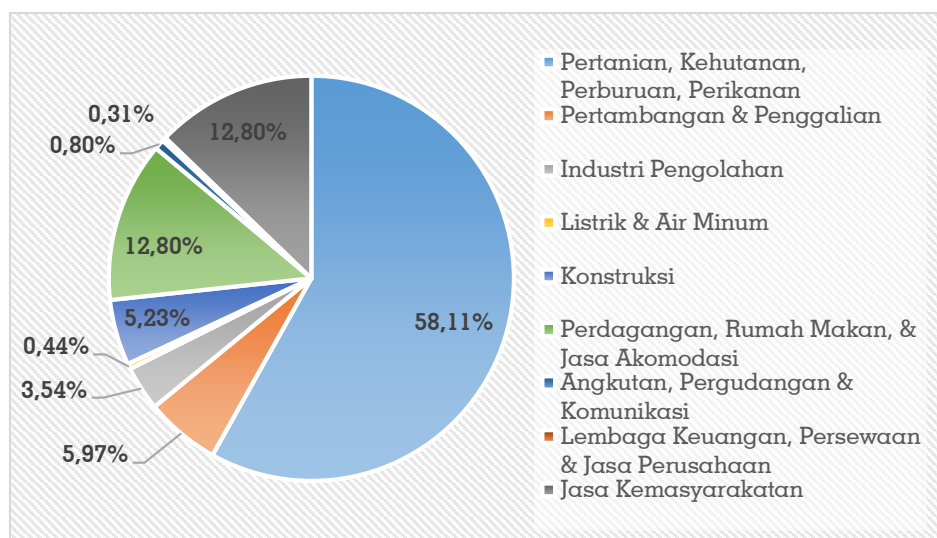
**Tabel 2.18 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha/ Sektor Tahun 2012**

No	Sektor	Tahun 2012	
		Penduduk (Jiwa)	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	34.187	58,11
2	Pertambangan & Penggalian	3.511	5,97
3	Industri Pengolahan	2.083	3,54
4	Listrik & Air Minum	256	0,44
5	Konstruksi	3.078	5,23
6	Perdagangan, Rumah Makan, & Jasa Akomodasi	7.532	12,80
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	468	0,80
8	Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	185	0,31
9	Jasa Kemasyarakatan	7.528	12,80
Total		58.828	100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha/sektor ekonomi dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, selama tahun 2012 sebagian besar penduduk Kabupaten Pulang Pisau bekerja pada sektor **Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan** yaitu mencapai 34.187 jiwa atau mencapai 58,11% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor Perdagangan, Rumah Makan, & Jasa Akomodasi dan Jasa Kemasyarakatan masing-masing sebanyak 12,80%. Sementara itu, untuk sektor Listrik & Air Minum dan Angkutan, Pergudangan & Komunikasi hanya mencapai kurang dari 1%.

**Bagan 2.11 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau yang Bekerja
Menurut Sektor Tahun 2012**



Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1. Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pulang Pisau Tahun 2009-2012

Kategori Umur	Angka Partisipasi Sekolah			
	2009	2010	2011	2012
Usia 7-12 tahun	99,69	99,57	99,13	95,15
Usia 13-15 tahun	86,44	85,31	87,89	84,83
Usia 16-18 tahun	55,12	55,41	53,04	50,23

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada kecenderungan menurun dari 99,99% (tahun 2009) menjadi 95,15% (tahun 2012). APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 13-15 tahun ada kecenderungan meningkat dari 86,44% (tahun 2009) menjadi 84,83% (tahun 2012). Sedangkan APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau 16-18 tahun ada kecenderungan menurun dari 55,12% (tahun 2009) menjadi 50,23% (tahun 2012). APS tahun 2012 untuk penduduk Kabupaten Pulang Pisa usia 7-12 tahun sebesar 95,15%, artinya dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada 95 penduduk yang bersekolah. Dari ketiga kelompok umur tersebut, APS penduduk usia 16-18 tahun adalah yang paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk berpendidikan tinggi masih rendah.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

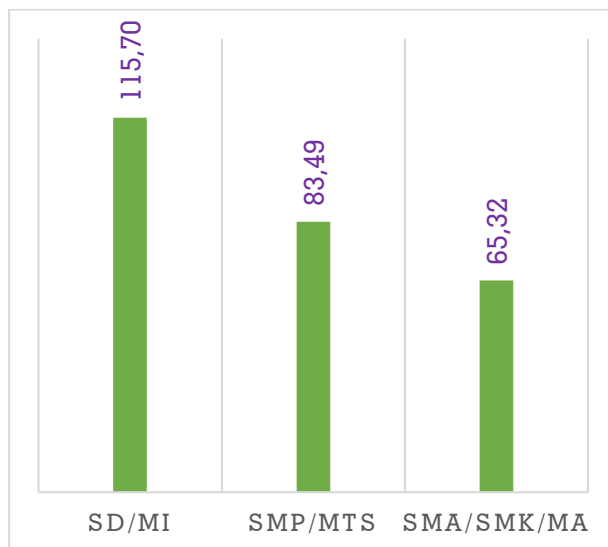
Tabel 2.20 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012

No	Indikator	Rasio
		2011/2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	115,70
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	83,49
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	65,32

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Rasio Sekolah-Murid di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012 paling tinggi adalah pada tingkat Sekolah Dasar yaitu sebesar 115,70 per 10.000 murid. Disusul dengan rasio pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 83,49 dan yang paling rendah adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 65,32 per 10.000 murid. Semakin rendah rasio berarti semakin tidak baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah.

Bagan 2.12 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

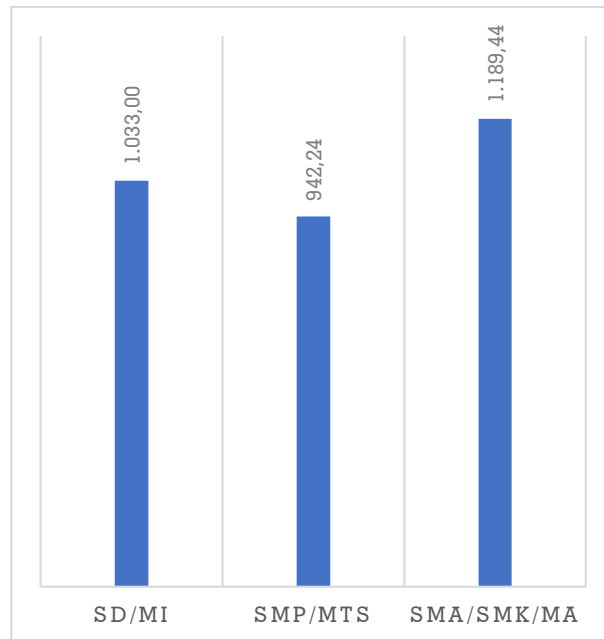
3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.21 Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012

No	Indikator	Rasio
		2011/2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1.033,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	942,24
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1.189,44

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Bagan 2.13**Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Pulang Pisau
2011/2012**

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Rasio Guru-Murid di Kabupaten Pulang Pisau 2011/2012 paling tinggi adalah pada tingkat Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 1.189,44 per 10.000 murid. Disusul dengan rasio pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 1.033,00 dan yang paling rendah adalah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 942,24 per 10.000 murid. Semakin rendah rasio berarti semakin tidak baik karena kurangnya guru atau siswa di tingkat tersebut. .

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Tujuan tersebut diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

1. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2.22 Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2010-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012
1	Puskesmas	0,09	0,09	0,09
2	Puskesmas pembantu	0,88	0,86	0,86

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2010 masih sama dengan tahun 2011 dan 2012. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebesar 0,02 dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sementara tahun 2012 sama dengan 2011.

Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah mengukur ketersediaan puskesmas dan puskesmas berdasarkan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun puskesmas. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun puskesmas. Penurunan nilai puskesmas ini diharapkan tidak terjadi secara menerus. Kesesuaian antara fasilitas kesehatan dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.

2. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Data mengenai Rasio Rumah Sakit terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2010-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012
1	Rumah Sakit	0,01	0,01	0,01

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Sumber data Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Pulang Pisau adalah 119.983 jiwa

pada tahun 2010, dan 122.511 jiwa pada tahun 2012, dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Pulang Pisau ada 1 rumah sakit. Dari data diatas dapat dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui yaitu 0,01 setiap tahunnya.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

3. *Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk*

Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data mengenai Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2012

No	Tenaga Kesehatan	Rasio
		2011
1	Dokter	0,16
2	Paramedis lainnya	2,30

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Dari tabel diketahui bahwa rasio dokter di Kabupaten Pulang Pisau hanya 0,16 untuk setiap 1.000 penduduk, artinya rasio dokter sangatlah rendah. Sedangkan untuk rasio tenaga medis sudah cukup baik.

Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu setiap dokter melayani 2.500 penduduk. Berdasarkan fakta yang ada, di Indonesia jumlah dokter dan dokter spesialis belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter di Indonesia belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.

4. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Tabel 2.25 Cakupan Puskesmas dan Pustu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun 2012 (%)
1	Puskesmas	137,50
2	Puskesmas Pembantu	106,06

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013, diolah

Dari tabel, diketahui bahwa cakupan untuk puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau adalah 137,50%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 106,06%. Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya semakin baik. Cakupan puskesmas bernilai 137,50%, yang berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum. Pada puskesmas pembantu nilai cakupannya 106,06%. hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu juga mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

1. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2012 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.26 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	330,84	347,48
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	215,88	263,51
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,00	218,11
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	113,63
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	884,66	942,73

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2012, diolah

Dari tabel, diketahui panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik adalah 119,50 km untuk jalan negara, 97 km untuk jalan provinsi, dan 347,48 km untuk jalan kabupaten. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa pada tahun 2012 untuk jalan negara sebanyak 100% jalan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan provinsi sebanyak 58,08% dalam kondisi baik. Sementara itu, untuk jalan kabupaten hanya sebanyak 36,86% dari panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik.

Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

3. *Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat*

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Data untuk menghitung drainase dalam kondisi baik tidak cukup lengkap. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana drainase.

2.3.1.4. Perumahan

1. *Rumah Tangga Pengguna Air Bersih*

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum merupakan hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri.

**Tabel 2.27 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum
Kabupaten Pulang Pisau 2009-2012**

Tahun	Fasilitas Air Minum			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
2009	66,31	9,13	8,15	16,41
2010	58,89	11,15	4,65	25,31
2011	52,16	23,23	12,87	11,74
2012	59,15	27,23	11,16	2,46

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas air minum cenderung menurun dari 16,41% (tahun 2009) menjadi 2,46% (tahun 2012). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

akan pentingnya penggunaan air bersih bagi kesehatan. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga pengguna fasilitas air minum sendiri sebesar 59,15% yang artinya bahwa 100 rumah tangga Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012, ada 59 rumah tangga yang menggunakan air minum sendiri.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Tabel 2.28 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tahun	Sumber Penerangan		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Lainnya
2009	75,04	8,69	16,27
2010	80,93	5,66	13,41
2011	71,83	15,67	12,50
2012	78,14	12,17	9,69

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa daerah di Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan fasilitas penerangan yang berasal dari PLN. Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 75,04% (tahun 2009) menjadi 78,14% (tahun 2012). Karena sering matinya jaringan listrik PLN pada tahun 2012, sehingga sebagian masyarakat yang menggunakan listrik non PLN selama tahun 2009-2012 meningkat dari 8,69% (tahun 2009) menjadi 12,17%.

Sedangkan persentase rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 yang masih belum menggunakan listrik sebesar 9,69%, yang artinya dari 100 rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau, ada 10 rumah tangga yang masih mendapatkan fasilitas listrik sebagai sumber penerangan. Selama tahun 2009-2012 persentase penduduk yang tidak menggunakan listrik kecenderungan menurun dari 16,27% (tahun 2009) menjadi 9,69% (tahun 2010).

3. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Fasilitas perumahan yang tidak kalah penting adalah tempat buang air besar atau jamban/kakus. Fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah jamban/kakus dengan tangki septik. Keadaan jamban keluarga sangat erat hubungannya dengan kesehatan itu sendiri. Dengan demikian tersedianya fasilitas ini menandakan status dan kondisi tempat tinggal memenuhi syarat kesehatan lingkungannya.

Rumah tangga ber-sanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri.

Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Buang Air Besar

Tahun	Air Besar Fasilitas Buang Air Besar			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
2009	50,97	21,75	6,04	21,24
2010	60,31	19,92	6,07	13,70
2011	51,84	28,45	6,00	13,71
2012	47,75	33,46	11,80	6,99

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Selama tahun 2009-2012, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar cenderung menurun dari 21,24% (tahun 2009) menjadi 11,80% (tahun 2012). Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri sebesar 47,75% yang artinya dari 100 rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2012 ada 48 rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri.

2.3.1.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber- KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2012 disebutkan mengenai pencapaian pelayanan KTP (jumlah lembar KTP).

Tabel 2.30 Daftar Wajib KTP, Yang Sudah Perekaman e-KTP, Yang Sudah Dicetak Per-Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

No.	Kecamatan	Wajib KTP	Yang Sudah Perekaman	E-KTP Yang Sudah Dicetak
1.	Pandih Batu	15.601	10.702	9.617
2.	Kahayan Kuala	13.862	7.868	6.015
3.	Kahayan Tengah	5.360	4.510	4.153
4.	Banama Tingang	5.278	4.115	3.373
5.	Kahayan Hilir	17.169	13.105	11.951
6.	Maliku	17.091	13.681	10.844
7.	Jabiren Raya	5.500	4.075	2.495
8.	Sebangu Kuala	6.134	3.316	1.864
	JUMLAH	85.995	61.372	50.312
	Rata-Rata		71,36%	

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Semakin banyak penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Banyaknya penduduk Ber-KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk serta memudahkan pemerintah dalam merencanakan perencanaan yang akan dibuat.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari.

Dalam LKPJ AMJ Kabupaten Pulang Pisau tahun 2008-2013 mengenai data kepemilikan akta kelahiran disebutkan capaian kinerja untuk jumlah penerbitan Akta Kelahiran sampai pada tahun 2012 adalah sebesar sebesar 85,80%. Pencapaian pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012 tergantung dengan angka kelahiran pada tahun tersebut. Melihat pentingnya akta kelahiran dimasa mendatang, penduduk sudah semakin cerdas untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya. Sosialisasi ke daerah-

daerah perdesaan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar setiap penduduk memiliki akta kelahiran.

2.3.1.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Akseptor KB

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Berikut data mengenai akseptor KB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012, dengan sumber data Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2013.

Tabel 2.31 Akseptor KB Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

Tahun	Jumlah Klinik	Akseptor Aktif	Akseptor Baru
2009	88	8.277	3.782
2010	88	14.942	5.634
2011	115	17.941	3.593
2012	102	8.971	4.516

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah klinik KB di Kabupaten Pulang Pisau selama 2009-2011 mengalami peningkatan menjadi 115, namun menurun kembali pada tahun 2012 menjadi hanya 102 klinik. Sementara itu untuk akseptor KB aktif di Kabupaten Pulang Pisau hanya meningkat selama periode 2009-2011 menjadi 17.971 akseptor aktif, dan menurun sangat signifikan pada tahun 2012 menjadi hanya 8.971 akseptor. Semakin rendahnya akseptor KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pulang Pisau, mulai gencar dalam promosi KB melalui *workshop* atau seminar sehingga langsung bertemu dengan calon akseptor KB. Saat ini pemerintah pusat sudah banyak melakukan banyak promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini di teruskan ke daerah.

2. Target dan Realisasi Peserta KB Aktif

Tujuan dari Keluarga Berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Data peserta KB Aktif diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka Tahun 2013 sebagai berikut.

Tabel 2.32 Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

Tahun	Akseptor Aktif		Persen (%)
	Target	Realisasi	
2009	14.538	8.277	56,93
2010	7.743	14.942	192,97
2011	12.667	17.941	141,64
2012	15.738	8.971	57,00

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa realisasi peserta KB aktif mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2009 realisasi mencapai 56,93% dari target, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 192,97% dari target, kemudian mengalami penurunan menjadi 141,64% dari target. Sedangkan pada tahun 2012 hanya mencapai 57,00% dari target, artinya tahun 2012 Kabupaten Pulang Pisau belum mencapai target terhadap jumlah akseptor KB.

2.3.1.7. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergerakaknya roda pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Data dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2010-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.33 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulang Pisau Tahun 2010-2012**

Keterangan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,11	73,36	69,51

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2012 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 TPAK sebesar 68,11% meningkat menjadi 73,36% pada tahun 2011, dan menurun kembali pada tahun 2012 menjadi 69,51%. TPAK Kabupaten Pulang Pisau sebesar 69,51% berarti dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 70 orang diantaranya termasuk angkatan kerja aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur.

Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa di Tahun 2012 semakin sedikit bagian dari penduduk usia kerja. Semakin berkurang nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk di Kabupaten Pulang Pisau yang berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja sebaiknya menjadi perhatian bagi Pemertintah Daerah agar menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Data tingkat pengangguran terbuka bersumber dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka tahun 2013.

Tabel 2.34 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 – 2012

Keterangan	Tahun		
	2010	2011	2012
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,11	2,62	2,59

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan dan juga penurunan, yaitu dari 2,11% (2010) menjadi 2,62% (2011), dan 2,59% (2012). Semakin rendah nilai pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi daerah.

2.3.1.8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

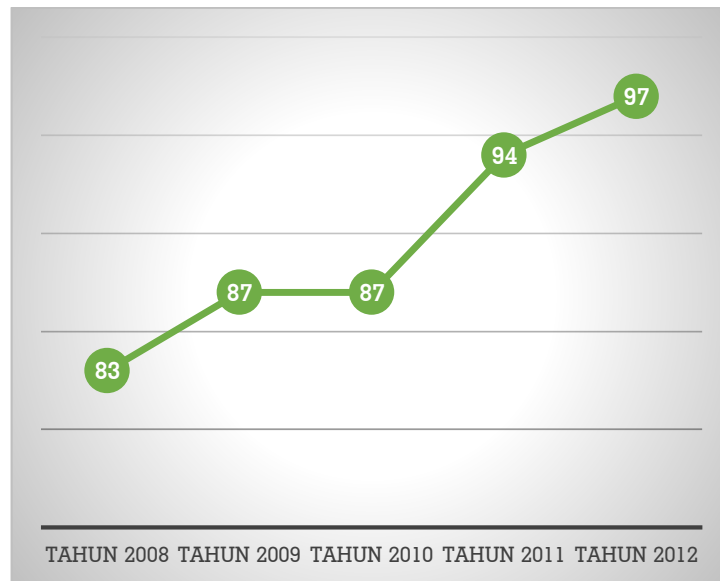
1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data persentase Koperasi Aktif yang bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Koperasi Aktif	66,94	67,97	67,97	69,63	70,29

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013



Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 ke 2010, nilai peningkatan sebesar 1,66%. Peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting.

Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Dengan demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

2. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

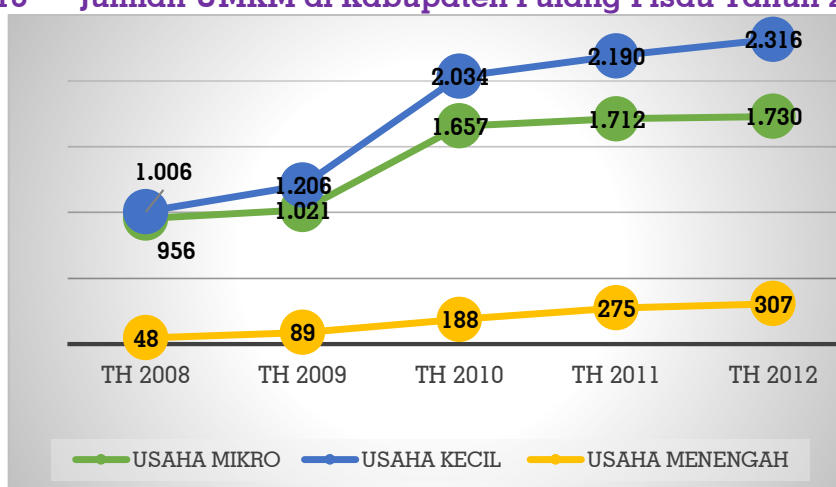
Data mengenai Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

Tahun	Usaha Mikro (Unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)
2008	956	1.006	48
2009	1.021	1.206	89
2010	1.657	2.034	188
2011	1.712	2.190	275
2012	1.730	2.316	307

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Bagan 2.15 Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah UMKM setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 ke 2010, baik Usaha Mikro, Kecil, maupun Menengah. Pada tahun 2008 ke 2012 dalam satu tahun peningkatan usaha kecil meningkat

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM non BPR/LKM yang berjumlah ribuan dirasa dapat menggerakkan ekonomi daerah, sehingga dalam pelayanannya terhadap penduduk dapat dioptimalkan dan meminimalisir barang-barang yang didatangkan dari luar daerah. Peran pemerintah sebagai pemegang kendali diperlukan dalam rangka pengembangan UKM melalui berbagai penyaluran dana pengembangan UKM dan promosi ke berbagai daerah melalui acara-acara yang diselenggarakan daerah.

2.3.1.9. Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 menyebutkan capaian kinerja yang diperoleh urusan penanaman modal dari tahun 2008 hingga 2012. Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah investasi dalam tahun 2012 di Kabupaten Pulang Pisau telah memberi ijin investasi sebanyak 62 perizinan

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian

pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.

2.3.1.10. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Berikut adalah data produksi dan kebutuhan beras yang merupakan bagian terpenting untuk ketersediaan bahan pangan.

Tabel 2.37 Data Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2008-2012

No	Tahun	Produksi Beras (Ton)	Kebutuhan Beras (Ton)	Selisih
1.	2008	32.220	16.827	15.394
2.	2009	32.337	17.155	15.182
3.	2010	45.927	17.264	28.663
4.	2011	35.411	17.090	18.320
5.	2012	37.136	18.665	18.471

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa selisih produksi beras dengan kebutuhan beras pada tahun 2008 dan 2009 adalah 2:1, dimana jumlah produksi lebih besar dibanding kebutuhan akan beras, sehingga selisihnya lebih kurang ($\pm$) setengah dari dari kebutuhan beras. Sedangkan pada tahun 2010 produksi beras semakin meningkat, dimana selisih produksi beras lebih besar dibanding kebutuhan beras, dan pada tahun 2010 dan 2011, kembali selisih berbanding 2:1 seperti pada tahun 2008 dan 2009.

Program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan bibit unggul dalam penanaman tanaman pangannya.

2.3.1.11. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.

- Buku "Kabupaten Dalam Angka"
- Buku "PDRB Kabupaten"

Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Pulang Pisau, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

2.3.1.12. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi merupakan hal penting akhir-akhir ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Begitu pula dengan informasi, semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Memudahkan penduduknya memperoleh informasi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki situs resmi dengan alamat www.pulangpisaukab.go.id.

Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah *up to date*. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Pulang Pisau. Adanya situs pemerintahan memudahkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dan seluruh dunia dengan mudah mengakses situs Kabupaten Pulang Pisau.

2.3.1.13. Perpustakaan

Perpustakaan adalah tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan

perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPI AMJ) Kabupaten Pulang Pisau Periode 2008-2013 hanya disebutkan terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan dan perlengkapan serta pengadaan buku-buku perpustakaan di sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SLTA tersebar di 8 Kecamatan (17 desa).

2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian dan Kehutanan

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang termasuk sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan & perkebunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

**Tabel 2.38 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata- rata
Pertanian	56,08	56,93	57,43	57,44	58,12	57,20

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 57,20%. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pulang Pisau cenderung stabil, ini menunjukkan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.

**Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012 (jutaan rupiah)**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	578.014,89	650.073,06	743.337,42	841.621,96	975.201,84
a. Tanaman Bahan Makanan	193.510,14	208.110,11	233.582,99	250.082,96	280.424,83
b. Tanaman Perkebunan	212.124,47	246.908,04	293.086,59	349.293,74	419.977,47
c. Peternakan dan Hasil-Hasilnya	39.100,96	46.281,39	53.116,33	61.838,85	71.448,43
d. Kehutanan	47.304,59	49.427,58	51.212,08	54.874,83	58.315,31
e. Perikanan	85.974,73	99.345,95	112.339,42	125.531,58	145.035,79

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Lamandau adalah dari sektor pertanian yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2008-2012 (Tabel 2.39). Sub sektor yang menyumbang terbesar adalah Tanaman Perkebunan sebesar Rp.212.124,47 juta pada tahun 2008 dan menjadi Rp.419.977,47 juta pada tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa Tanaman Perkebunan merupakan potensi terbesar di Kabupaten Lamandau. Sub sektor penyumbang terbesar kedua adalah Tanaman Bahan Makanan, Sub Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah Perikanan. Sementara Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Kehutanan berada di urutan keempat dan kelima

2.3.2.2. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian Terhadap
PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012**

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata- rata
Pertambangan & penggalian	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,27

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 0,27%, sehingga rata-rata kontribusinya tetap 0,27%. Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB.

2.3.2.3. Perdagangan dan Pariwisata

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pariwisata adalah industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.41 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran Terhadap PDRB Pulang Pisau Tahun 2008-2012

Sektor	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Rata-rata
Perdagangan, hotel & restoran	15,80	15,31	15,45	15,43	15,01	15,40

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2013

Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008-2012 fluktuatif. Pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 15,80% (2008) menjadi 15,31%. Kemudian meningkat pada tahun 2010 dan 2011. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 15,40%. Penurunan kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebaiknya menjadi perhatian khusus dalam hal perbaikan infrastruktur perdagangan dan pariwisata, sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga konstan 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2008 hingga tahun 2012. Pada tahun 2008 PDRB ADHK Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 666.398,11 Juta Rupiah meningkat menjadi 839.190,30 Juta Rupiah pada tahun 2009.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur adalah fokus pertama dari 3 fokus yang dibahas pada aspek daya saing daerah. Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Pulang Pisau. Kesiapan tersebut diukur dari sub fokus sebagai berikut

2.4.2.1. Perhubungan

Berdasarkan data BPS tahun 2011-2012 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2011-2012

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	330,84	347,48
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	215,88	263,51
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,00	218,11
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	119,94	113,63
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	884,66	942,73

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang diselesaikan merupakan jumlah perkara pidana yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah perkara pidana yang terselesaikan di Kabupaten Pulang Pisau dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2.43 Persentase Perkara Pidana yang Tertangani Tahun 2010-2012

Tahun	Perkara Pidana (Kriminal)		Persentase yang Diselesaikan
	Yang Diterima	Yang Diselesaikan	
2010	109	86	78,90
2011	102	82	80,39
2012	160	123	76,88

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Jumlah perkara pidana di Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan, yaitu dari 109 kasus pada tahun 2010 menjadi 160 kasus pada tahun 2012. Jika dilihat dari persentase yang terselesaikan cenderung fluktuatif, yaitu 78,90% pada tahun 2010, meningkat menjadi 80,39% pada tahun 2011, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 (76,88%).

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Fokus ini berfungsi untuk melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan.

Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012

No	Uraian	2012
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	37.350
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5.537
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	42.887
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	79.624
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	53,86

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2013

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan data tahun 2012 nilai angka ketergantungan di Kabupaten Pulang Pisau nilainya diatas 53,86%. Ini menunjukkan bahwa usia produktif di Kabupaten Pulang Pisau menanggung usia yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan nilai angka ketergantungan yang cukup tinggi diharapkan pemerintah membantu penduduknya dengan membuka lapangan kerja baru sehingga pembangunan daerah tidak terhamabat oleh angka ketergantungan yang tinggi.

2.5 Kinerja Pembangunan Daerah

Selain gambaran yang disajikan pada tiga aspek dalam Sub Bab 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, Sub Bab 2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat, Sub Bab 2.3 Aspek Pelayanan Umum, dan Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau menggambarkan capaian kinerja daerah sesuai dengan kinerja yang tersedia pada lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 yang terlihat dalam tabel 2.42 dibawah ini:

Tabel 2.45 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2012

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan PDRB							
-	Atas Harga Berlaku	%	11,71	10,78	13,34	13,22	14,50	13,30
-	Atas Harga Konstan	%	5,38	5,21	5,53	6,00	6,99	7,00
1.2	Laju Inflasi	%						
1.4	Persentase penduduk miskin	%	9,26	6,23	5,22	5,45	5,25	4,80
1.5	Angka Pengangguran	jiwa	3,72	2,26	2,11	2,62	2,59	2,20
II	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	APK SD/SDLB/MI	%	95,73	117,91	98,73	114,93	108,32	104,14
2.1.2	APK SMP/MTs	%	93,25	92,81	87,00	98,06	82,23	88,07
2.1.3	APK SMA/SMK/MA	%	79,44	82,83	74,89	88,41	60,56	58,44
2.1.4	APM SD/SDLB/MI	%	79,44	94,85	95,11	97,65	95,00	88,02
2.1.5	APM SMP/MTs	%	89,56	91,02	84,60	86,19	73,57	65,47
2.1.6	APM SMA/SMK/MA	%	68,93	78,75	54,74	81,83	53,33	40,86
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Angka Kematian Bayi	jiwa	115,00	35,00	140,00	161,00	227,00	209,00
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	60,2	62,5	64,6	65,3	67,74	71,00
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	%	9,00	5,00	5,00	6,00	6,00	5,00
2.2.4	Angka Kematian Ibu	%	0,007	0,00	0,00	0,00	0,009	0,05
2.2.5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (dilaporkan)	Persen	-	-	-	-	-	-
III	Fokus Budaya dan Olahraga							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3.2	Jumlah Gedung Olahraga	buah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.3	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	477,00	506,00	516,00	525,00	470,00	500,00
ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	-	99,69	99,57	949,07	966,99	880,23
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	-	-	-	129,59	128,30	128,58
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	-	-	-	793,70	723,93	836,27
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	-	-	-	79,37	72,39	83,63
1.1.2	Pendidikan Menengah							
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	-	-	-	833,15	748,89	654,75
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	-	-	-	69,41	69,41	68,18
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	-	-	-	345,59	576,95	630,23
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	-	-	-	34,56	57,70	63,02
1.1.2e	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	93,80	94,91	98,24	98,81	98,83	98,85
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	366,06	430,66	506,67	563,01	542,78	410,18
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	Rasio	-	-	-	37,20	38,68	39,62
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	Rasio	-	-	-	643,35	579,29	662,83
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	Rasio	-	-	-	64,33	57,93	66,28

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	26,98	32,03	37,08	42,23	43,28	43,43
1.1.4	Angka Putus Sekolah							
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,70	0,48	0,46	0,44	0,25	0,41
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	-	-	-	1,13	0,70	0,74
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,99	0,95	1,01	0,88	1,45	0,85
1.1.4d	penurunan angka putus sekolah	persen	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Angka Kelulusan							
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	-	-	-	88,97	99,77	99,96
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	-	-	-	99,35	99,27	99,87
	Angka melanjutkan sekolah							
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	75,92	78,27	76,74	77,52	80,90	90,85
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	persen	55,18	56,89	59,88	63,04	80,60	83,46
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	orang	57,36	61,03	64,93	69,08	73,65	77,72
1.2	Kesehatan							
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	1,2	1,4	1,2	1,6	1,5	1,7
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	0,73	0,76	0,8	0,79	0,83	0,8
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,53	0,58	0,6	0,6	0,7	0,7
1.2.4	Rasio dokter persatuan penduduk	rasio	15,00	20,00	19,00	17,00	16,00	15,00
1.2.5	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	rasio	81,00	118,00	103,00	93,00	80,00	85,00
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	95,25	81,54	70,56	80,2	75,00	75,00
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	63,2	67,00	70,5	68,5	72,00	90,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	13,00	13,15	20,6	29,00	32,5	35,00
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	78,00	83,74	92,52	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	80,6	87,4	91,61	95,21	96,52	100,00
1.2.12	Cakupan puskesmas	persen	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
1.2.13	Cakupan Puskesmas Pembantu	persen	58,00	64,00	66,00	68,00	70,00	74,00
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	98,85	76,79	76,79	15.485,0 0	74,65	90,00
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	94,00	100,00	100,00	98,00	98,00	94,00
1.3	Pekerjaan Umum							
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	18,00	26,00	37,00	37,00	37,00	65,00
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	0,40	0,54	0,54	0,54	0,64	0,64
1.3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio						
1.3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	-	-	-	43,77	48,12	51,56
1.3.5	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio						
1.3.7	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	-	-	-	-	0,83	0,83
1.3.8	Rasio Permukiman Layak Huni	rasio	-	-	-	-	-	0,30
1.3.9	Panjang Jalan dilalui roda empat	rasio	0,80	0,26	0,37	0,37	0,37	0,65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	persen	0,18	0,26	0,37	0,37	0,37	0,65
1.3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	persen	-	-	-	3,50	3,50	3,50
1.3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.15	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	-	-	3,50	4,00	4,00	8,00
1.3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	persen	-	-	-	-	-	-
1.3.17	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	45,00	50,00	52,00	53,00	52,00	54,00
1.3.18	Lingkungan Pemukiman	Persen	-	-	-	-	-	-
1.4	Perumahan							
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	4,74	5,22	5,61	5,51	7,17	7,17
1.6	Perencanaan Pembangunan							
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Perhubungan							
1.7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jumlah	3.600,00	3.500,00	4.500,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00
1.7.2	Rasio ijin trayek	rasio	-	-	-	-	-	-
1.7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	199,00	149,00	228,00	336,00	540,00	489,00
1.7.4	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.7.5	Jumlah angkutan darat	jumlah	100,00	100,00	100,00	151,00	173,00	175,00
1.7.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	0,07	0,07	0,07	0,15	0,16	0,17
1.7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Harga (Rp)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.9	Pemasangan rambu-rambu	Unit	0,00	154,00	48,00	98,00	209,00	0,00
1.8	Lingkungan Hidup							
1.8.1	Persentase penanganan sampah	persen	-	-	8,90	10,00	20,00	16,40
1.8.2	Persentase penduduk berakses air minum	persen	-	-	-	28,20	31,00	32,40
1.8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.4	Pencemaran status mutu air	persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.6	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	-	-	-	-	-	-
1.8.8	Penegakan hukum lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	62,10	63,15	65,05	70,02	71,15	74,00
1.10.2	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	45,00	47,00	49,00	50,80	52,13	53,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.3	pasangan berakte nikah	Pasang	74,00	76,43	78,11	80,15	81,90	83,00
1.10.4	Persentase kepemilikan KTP	Persen	45,00	46,88	49,12	51,11	53,09	55,00
1.10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	20,00	20,16	22,33	23,16	24,11	25,00
1.10.6	Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak							
1.11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	-	4,20	4,34	4,39	4,95	5,00
1.11.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	-	95,60	95,66	95,61	95,05	95,00
1.11.3	Rasio KDRT	Rasio	-	0,04	0,01	0,01	0,08	0,08
1.11.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (Dinsostran)	Persen	-	-	-	-	-	-
1.11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	-	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera							
1.12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.12.2	Persentase Akseptor KB	persen	-	65,82	81,37	82,05	82,50	76,21
1.12.3	Cakupan peserta KB aktif	persen	-	64,30	75,85	82,00	80,20	51,09
1.12.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	-	50,56	42,29	36,79	37,16	15,41
1.12.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	-	12,50	12,42	12,35	12,21	12,00
1.12.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	-	64,30	75,85	82,00	80,20	51,09

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.12.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	Persen	-	23,13	15,89	14,13	14,57	20,02
1.12.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	Persen	-	82,00	82,50	83,70	77,79	98,94
1.12.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	-	85,00	89,00	100,00	88,41	90,91
1.12.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	Persen	-	-	-	16,50	16,50	16,70
1.12.11	Keluarga pra sejahtera dan KS I	Persen	-	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00
1.12.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	-	1,03	1,09	1,01	1,04	1,04
1.12.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	-	96,77	91,84	98,99	97,98	95,96
1.13	Sosial							
1.13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang		1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
1.13.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen						
1.14	Ketenagakerjaan							
1.14.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	-	82,81	84,25	85,25	70,92	70,92
1.14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	-	-	4,30	4,30	8,60	8,60
1.14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	-	82,21	84,25	85,29	84,97	106,95
1.14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	-	10,00	11,00	11,00	12,00	12,00
1.14.5	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	-	2,30	2,32	2,46	2,84	2,59
1.14.6	Persentase keselamatan dan perlindungan	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14.7	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
1.15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.1	Persentase koperasi aktif	persen	66,94	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97
1.17	Kebudayaan							
1.17.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00
1.17.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00
1.17.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	0,00	0,00	11,49	11,49	11,49	13,79
1.18	Kepemudaan dan Olahraga							
1.18.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
1.18.2	Jumlah Orgasnisasi olahraga	jumlah	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
1.18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	5,00	5,00	2,00	7,00	5,00	4,00
1.18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	2,00	8,00	6,00	8,00	10,00	7,00
1.18.5	Gelanggang/balai remaja	jumlah	0,66	0,69	0,75	0,81	0,97	0,84
1.18.6	Lapangan Olahraga	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
1.19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.20.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	2,32	2,28	2,33	2,29	2,28	2,29
1.20.7	Persentase penegakan PERDA	persen	0,05	15,00	25,00	30,00	40,00	65,00
1.20.8	Cakupan patrol petugas Satpol PP	jumlah	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00
1.20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.10	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten	persen						
1.20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan
1.20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)	persen	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
1.20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	persen						
1.20.14	Sistem Informasi Manajemen Pemda	jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21	Ketahanan Pangan							
1.21.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
1.21.2	Ketersediaan pangan utama							
	Beras	persen	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70	121,70
	Daging	persen	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Telur	persen	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
	Ikan	persen	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.22.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.4	LPM berprestasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.22.5	Persentase PKK aktif	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.22.6	Persentase posyandu aktif	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Statistik							
1.23.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.23.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.24	Kearsipan							
1.24.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	0,00	0,00	11,11	13,88	13,88	13,88
1.24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.26	Perpustakaan							
1.26.1	Jumlah perpustakaan	buah	1,00	1,00	5,00	22,00	30,00	40,00
1.26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	264,00	264,00	685,00	700,00	850,00	2.815,00
1.26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah buku	500,00	500,00	702,00	1.402,00	2.142,00	2.617,00
2,00	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Pertanian							
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal per hektar	26,94	29,92	28,90	31,80	32,20	36,05
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen		56,93	57,43	57,44	58,12	58,75
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03
2.1.4	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	persen	18,05	18,05	18,05	18,05	17,07	16,71
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	20,58	21,62	22,65	23,84	25,03	25,03
2.2	Kehutanan							
2.2.1	Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	persen	0,74	2,58	2,18	0,07	1,04	1,04
2.2.2	Persentase kerusakan kawasan hutan	persen	0,01	0,01	5,12	0,01	0,01	0,01
2.2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	4,59	4,33	3,96	3,74	3,48	3,48
2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	12,50
2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	0,27	0,27	0,27	0,27	0,43	0,01
2.4	Pariwisata							
2.4.1	Kunjungan wisata	Persen	2,47	2,27	2,06	1,88	1,73	1,73
2.4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kelautan dan Perikanan							
2.5.1	Produksi Perikanan	ton per tahun	15.453,6	22.083,15	18.143,42	14.098,36	17.848,01	20.600,86
2.5.2	Konsumsi ikan	Kg/kapita/thn	21,71	23,91	27,35	30,16	32,93	35,96
2.5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	persen	10,00	12,29	18,01	20,39	24,32	27,16
2.5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	persen	98,86	99,06	95,76	91,38	89,81	87,44
2.5.5	Produksi perikanan kelompok budidaya	persen	1,13	0,94	4,23	8.098	10,18	12,58
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
2.00	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.1	Perhubungan							
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Lingkungan Hidup							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian setiap tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	persen	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00
3.	Fokus Iklim Berinvestasi							
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.2	Jumlah demo	kali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Lama proses perizinan	hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari
3.1.6	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
4.	Fokus Sumber Daya Manusia							
4.1.	Ketenagakerjaan							
4.1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	412,00	412,00	426,00	422,00	422,00	422,00
4.1.2	Rasio ketergantungan	rasio	46,00	54,30	43,38	43,38	43,38	43,00